

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN ETOMIDATE SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN II DI BNN KOTA SURABAYA PASCA PERUBAHAN STATUS YURIDIS

Nita Arianti¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, alimasnun@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, aiuelisabeth@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

The development of electronic cigarettes (vapes) in Indonesia has raised new legal issues, particularly the misuse of etomidate in vape liquids. Originally used as an anesthetic in medical practice, etomidate has been abused for its sedative and hallucinatory effects. Before its legal reclassification, the absence of explicit regulation created legal uncertainty and posed risks to public health and public order. This study aims to analyze the legal regulation of etomidate vape misuse and its juridical implications under Indonesian criminal law. This research employs an empirical legal method with statutory and sociological approaches. Data were collected through legislation, literature, scientific journals, and interviews with relevant stakeholders and analyzed qualitatively. The findings indicate that legal uncertainty, weak supervision of vape distribution, and limited public awareness have contributed to etomidate misuse. Therefore, clearer legal regulation, stronger supervision of vape products, and improved coordination among law enforcement agencies are essential to ensure legal certainty and protect society from the misuse of etomidate.

Keywords: Etomidate, Vape, Drug Abuse, Criminal Offense.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan baru dalam sistem hukum pidana, khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obatan yang memiliki efek psikoaktif. Salah satu bentuk perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya *New Psychoactive Substances* (NPS), yaitu zat psikoaktif baru yang dirancang untuk menghasilkan efek serupa narkoba konvensional, tetapi memiliki struktur kimia yang berbeda sehingga

pada awal kemunculannya belum seluruhnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam melakukan penegakan hukum karena adanya keterlambatan regulasi dibandingkan dengan perkembangan modus operandi kejahatan narkoba. Peredaran NPS tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas kebijakan pengawasan dan kemampuan negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari penyalahgunaan zat berbahaya(Rahmat et al. 2024)(Siregar 2026).

Salah satu NPS yang saat ini memperoleh perhatian serius ialah **etomidate**(Rahmat et al. 2024)(BNNRI n.d.). Pada dasarnya etomidate merupakan obat anestesi intravena yang digunakan dalam tindakan medis sebagai agen induksi anestesi dengan penggunaan yang terbatas dan berada di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Akan tetapi, dalam perkembangannya etomidate disalahgunakan dengan cara dicampurkan ke dalam cairan rokok elektronik (*liquid vape*) sehingga dapat menghasilkan efek sedatif dan euforia yang menyerupai narkoba. Modus penyamaran tersebut menyebabkan etomidate sulit dikenali oleh masyarakat karena dikemas dalam bentuk produk yang identik dengan gaya hidup modern. Penggunaan rokok elektronik yang semakin meningkat di kalangan remaja dan dewasa muda turut meningkatkan potensi penyalahgunaan etomidate karena pengguna sering kali tidak mengetahui kandungan zat yang terdapat dalam *liquid vape* yang dikonsumsi(Vapemagzofficial n.d.).

Fenomena penyalahgunaan etomidate dalam bentuk *liquid vape* menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan narkoba yang tidak lagi dilakukan melalui peredaran narkoba konvensional, melainkan melalui produk yang secara visual menyerupai

barang legal(Ii and Hukum 2010). Modus tersebut memperlihatkan kemampuan jaringan peredaran gelap narkoba dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum. Keadaan ini menimbulkan tantangan baru karena identifikasi terhadap etomidate tidak dapat dilakukan secara kasat mata, melainkan memerlukan pemeriksaan laboratorium dan kemampuan intelijen yang memadai(TV n.d.). Akibatnya, upaya pencegahan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan penanganan narkoba konvensional.

Peredaran etomidate di Indonesia bukan lagi merupakan ancaman yang bersifat hipotetis. Aparat penegak hukum telah mengungkap beberapa kasus penyalahgunaan etomidate, salah satunya melalui pengungkapan laboratorium gelap (*clandestine laboratory*) di kawasan Pluit, Jakarta Utara, yang memproduksi *liquid vape* mengandung etomidate dalam jumlah besar. Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa etomidate telah menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba yang terorganisasi dan melibatkan pelaku lintas negara. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa penyalahgunaan etomidate telah berkembang menjadi persoalan hukum nasional yang memerlukan respons kebijakan yang lebih komprehensif, baik melalui pembaruan regulasi maupun penguatan sistem pengawasan oleh aparat penegak hukum.

Merespons perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 yang memasukkan etomidate sebagai Narkoba Golongan II. Perubahan status yuridis tersebut membawa konsekuensi hukum yang mendasar karena etomidate tidak lagi dipandang semata-mata sebagai obat keras yang berada dalam rezim hukum kesehatan, melainkan menjadi objek pengaturan dalam rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan perubahan tersebut, seluruh bentuk produksi, distribusi,

kepemilikan, maupun penyalahgunaan etomidate tanpa hak dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Perubahan norma hukum tersebut sekaligus memperluas kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan tindakan pencegahan, pengawasan, penyelidikan, pemberantasan, serta rehabilitasi terhadap penyalahgunaan etomidate.

Secara normatif, kewenangan BNN dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta diperkuat melalui Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi BNN, termasuk BNN Kota Surabaya, untuk melakukan langkah-langkah preventif maupun represif terhadap setiap bentuk penyalahgunaan narkotika, termasuk etomidate setelah perubahan status hukumnya. Dengan demikian, perubahan status yuridis etomidate tidak hanya mengubah klasifikasi suatu zat, tetapi juga menuntut penyesuaian kebijakan, strategi pengawasan, dan pola penegakan hukum oleh institusi yang berwenang (Rahmat et al. 2024).

Penelitian mengenai etomidate sebagai *New Psychoactive Substances* (NPS) telah mulai berkembang seiring meningkatnya penyalahgunaan zat tersebut dalam bentuk *liquid vape*. Syamsudin dan Rospita Adelina Siregar (2026) mengkaji ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam penggolongan etomidate sebagai narkotika berdasarkan regulasi terbaru. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pengaturan hukum terhadap etomidate menyebabkan terjadinya pergeseran penegakan hukum dari rezim Undang-Undang Narkotika ke rezim Undang-Undang Kesehatan, sehingga menimbulkan celah dalam penindakan terhadap

peredaran *liquid vape* yang mengandung etomidate. Penelitian tersebut berfokus pada analisis normatif mengenai kepastian hukum dalam klasifikasi etomidate sebagai narkotika, tanpa mengkaji implementasi kebijakan pengawasan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Amalia Putri (2025) membahas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi oleh tenaga medis. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terbukti terdapat unsur kesalahan (*mens rea*), sedangkan penggunaan sesuai indikasi medis dan standar profesi tidak dapat dipidana. Fokus penelitian tersebut berada pada aspek pertanggungjawaban pidana tenaga medis dan pemanfaatan obat dalam pelayanan kesehatan, sehingga belum membahas strategi pencegahan maupun pengawasan terhadap penyalahgunaan etomidate yang telah berubah status menjadi Narkotika Golongan II.

Selanjutnya, penelitian Haryadi dan A. Zarkasi (2017) menjelaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran hukum berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di tingkat masyarakat. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai instrumen pencegahan peredaran narkotika, namun belum menguraikan strategi kelembagaan yang diterapkan oleh BNN dalam menghadapi perkembangan *New Psychoactive Substances*, khususnya etomidate yang disamarkan dalam bentuk *liquid vape*.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian sebelumnya lebih banyak membahas aspek normatif mengenai klasifikasi hukum etomidate, pertanggungjawaban pidana tenaga medis, serta peran masyarakat dalam

pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi strategi pencegahan dan pengawasan peredaran etomidate oleh BNN Kota Surabaya setelah perubahan status yuridis etomidate menjadi Narkoba Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena mengkaji implementasi kebijakan hukum melalui pendekatan hukum empiris dengan menitikberatkan pada strategi kelembagaan BNN Kota Surabaya, hambatan yang dihadapi dalam mendeteksi peredaran etomidate yang disamarkan dalam bentuk *liquid vape*, serta efektivitas pelaksanaan fungsi pencegahan dan pengawasan pasca perubahan status yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan status yuridis etomidate terhadap sistem pengawasan narkoba di Kota Surabaya serta menganalisis strategi dan kendala yang dihadapi BNN Kota Surabaya dalam melakukan pencegahan dan pengawasan peredaran etomidate sebagai Narkoba Golongan II.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) baik dari aspek objek kajian maupun implementasi kebijakan hukum. Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada klasifikasi hukum etomidate sebagai *New Psychoactive Substances* (NPS), pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan narkoba di bidang medis, serta peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi strategi pencegahan dan pengawasan peredaran etomidate oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) setelah perubahan status yuridis etomidate menjadi Narkoba Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Padahal, perubahan status hukum tersebut membawa konsekuensi terhadap kewenangan BNN dalam melakukan deteksi dini, pengawasan,

koordinasi lintas sektor, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan etomidate yang disamarkan dalam bentuk *liquid vape*.

Keunikan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan hukum empiris yang mengkaji secara langsung implementasi kebijakan melalui studi pada BNN Kota Surabaya sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan pengawasan peredaran narkotika. Penelitian ini tidak hanya menganalisis perubahan norma hukum (*das sollen*), tetapi juga mengkaji pelaksanaannya di lapangan (*das sein*) melalui data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas strategi pencegahan dan pengawasan yang diterapkan setelah perubahan status yuridis etomidate. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai implementasi kebijakan pengawasan *New Psychoactive Substances* di Indonesia serta menjadi rekomendasi bagi penguatan kebijakan BNN dalam menghadapi perkembangan modus operandi peredaran narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan status yuridis etomidate sebagai Narkotika Golongan II terhadap sistem pengawasan narkotika di Kota Surabaya serta menganalisis strategi dan kendala yang dihadapi BNN Kota Surabaya dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap peredaran etomidate yang disamarkan dalam bentuk *liquid vape* pasca berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang bertujuan menganalisis implementasi strategi pencegahan dan pengawasan peredaran etomidate sebagai Narkotika Golongan II di Kota Surabaya pasca perubahan status yuridisnya. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang

diperoleh melalui wawancara dengan Kepala BNN Kota Surabaya, Kepala Tim Pemberantasan, Kepala Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), serta Kepala Tim Rehabilitasi BNN Kota Surabaya, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengaturan narkoba dan *New Psychoactive Substances* (NPS). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan, strategi, serta kendala yang dihadapi BNN Kota Surabaya dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap peredaran etomidate.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Perubahan Status Yuridis Etomidate sebagai Narkoba Golongan II terhadap Sistem Pengawasan di Kota Surabaya

1.1 Implikasi Perubahan Status Yuridis Etomidate terhadap Sistem Pengawasan di Kota Surabaya

Perubahan status etomidate menjadi Narkoba Golongan II melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 membawa implikasi yang signifikan terhadap sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh BNN Kota Surabaya (Soerjono Soekanto 2019). Sebelum perubahan tersebut, etomidate masih dikategorikan sebagai obat keras sehingga kewenangan BNN dalam melakukan penindakan pidana terhadap penyalahgunaan etomidate yang dicampurkan ke dalam *liquid vape* relatif terbatas. Setelah ditetapkan sebagai narkoba, BNN memperoleh dasar hukum yang lebih kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk melakukan

tindakan penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, serta koordinasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Hasil wawancara dengan Kepala BNN Kota Surabaya dan Tim Pemberantasan menunjukkan bahwa perubahan tersebut mengubah pola pengawasan dari pendekatan administratif menjadi pendekatan yang lebih represif dan berbasis penegakan hukum. Dengan demikian, perubahan status yuridis etomidate telah memperkuat legitimasi hukum BNN dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran *liquid vape* yang mengandung etomidate.

1.2 Penguatan Sistem Pengawasan melalui Koordinasi dan Pemetaan Risiko

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status yuridis etomidate juga mendorong penguatan sistem pengawasan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan penerapan pengawasan berbasis risiko (Rivanie et al. 2022). BNN Kota Surabaya memperluas kerja sama dengan Kepolisian, BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan operasi bersama, pengambilan sampel *liquid vape*, serta penertiban toko vape yang diduga menjual produk mengandung etomidate. Selain itu, pengawasan tidak lagi hanya difokuskan pada toko vape secara fisik, tetapi juga mencakup distribusi melalui media sosial, *marketplace*, dan jasa ekspedisi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Pemberantasan dan Tim P2M, BNN Kota Surabaya mulai menyusun pemetaan jalur distribusi ilegal dan zona rawan penyalahgunaan sebagai dasar pelaksanaan operasi yang lebih efektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pengawasan dari pendekatan reaktif menjadi pengawasan yang bersifat preventif, proaktif, dan berbasis intelijen.

1.3 Penguatan Upaya Pencegahan melalui Edukasi dan Rehabilitasi

Perubahan status hukum etomidate juga berdampak pada penguatan strategi pencegahan melalui kegiatan edukasi dan rehabilitasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), BNN Kota Surabaya meningkatkan sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa, komunitas, dan pelaku usaha vape mengenai bahaya penyalahgunaan etomidate serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Di sisi lain, Tim Rehabilitasi tidak lagi hanya berperan dalam pemulihan penyalahguna narkoba, tetapi juga menjadi bagian dari sistem deteksi dini melalui identifikasi pola penyalahgunaan, kelompok sasaran, dan wilayah yang berpotensi menjadi pusat peredaran etomidate. Sinergi antara fungsi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan tersebut memperlihatkan bahwa sistem pengawasan BNN Kota Surabaya telah berkembang menjadi lebih komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan sosial.

1.4 Analisis *Das Sollen* dan *Das Sein*

Secara normatif (*das sollen*), perubahan status etomidate sebagai Narkoba Golongan II mewajibkan BNN melaksanakan pengawasan, pencegahan, penyidikan, serta koordinasi lintas sektor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Namun demikian, hasil penelitian (*das sein*) menunjukkan bahwa meskipun BNN Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai langkah strategis, seperti sidak toko vape, pemetaan daerah rawan, sosialisasi kepada masyarakat, dan koordinasi dengan berbagai instansi, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain belum tersedianya alat deteksi cepat etomidate, keterbatasan fasilitas laboratorium sehingga pengujian sampel masih bergantung pada Laboratorium BNN RI di

Jakarta, serta belum ditemukannya kasus resmi penyalahgunaan etomidate di Kota Surabaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan status hukum telah memberikan kepastian hukum dan memperkuat kewenangan BNN, tetapi efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana pendukung, kapasitas kelembagaan, serta koordinasi antarinstansi agar sistem pengawasan terhadap etomidate dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan tujuan kebijakan P4GN.

2. Apa saja Strategi dan kendala yang dihadapi BNN Kota Surabaya dalam mendeteksi dan mengawasi peredaran Etomidate yang disamakan dalam bentuk cairan elektronik (liquid vape) pasca ditetapkannya sebagai Narkotika Golongan II melalui Permenkes No. 15 tahun 2025

2.1 Strategi BNN Kota Surabaya dalam Mendeteksi dan Mengawasi Peredaran Etomidate

Pasca ditetapkannya etomidate sebagai Narkotika Golongan II melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 (Anon 2025), BNN Kota Surabaya menerapkan strategi pengawasan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan preventif, represif, rehabilitatif, dan kolaboratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BNN Kota Surabaya, Tim Pemberantasan, Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), serta Tim Rehabilitasi, strategi tersebut diwujudkan melalui peningkatan operasi pengawasan terhadap toko vape dan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, pemetaan jalur distribusi *liquid vape* ilegal, pengawasan transaksi melalui media sosial dan *marketplace*, serta penguatan koordinasi dengan Kepolisian, BPOM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan. Selain itu, BNN

Kota Surabaya juga meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada pelajar, mahasiswa, komunitas, dan pelaku usaha vape mengenai bahaya penyalahgunaan etomidate serta konsekuensi hukumnya. Tim Rehabilitasi turut berperan dalam mendukung deteksi dini dengan mengidentifikasi pola penyalahgunaan berdasarkan data rehabilitasi sehingga dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan strategi pengawasan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi pengawasan yang diterapkan tidak lagi berorientasi pada penindakan semata, tetapi juga mengedepankan pencegahan berbasis intelijen, edukasi masyarakat, dan sinergi antarlembaga.

2.2 Kendala dalam Pengawasan Peredaran Etomidate

Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Surabaya masih menghadapi sejumlah kendala dalam mendeteksi dan mengawasi peredaran etomidate yang disamarkan dalam *liquid vape*. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sarana pendukung berupa belum tersedianya alat deteksi cepat (*rapid test*) dan laboratorium pengujian di tingkat daerah sehingga pemeriksaan sampel masih bergantung pada Laboratorium BNN RI. Selain itu, peredaran *liquid vape* tanpa label yang dipasarkan melalui media sosial dan *marketplace*, keterbatasan jumlah personel, serta berkembangnya modus penyalahgunaan narkoba dalam bentuk cairan elektronik turut menyulitkan proses pengawasan. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai status hukum dan bahaya etomidate juga menghambat upaya deteksi dini karena masyarakat maupun pelaku usaha vape belum sepenuhnya memahami risiko hukum yang ditimbulkan. Di samping itu, koordinasi lintas daerah dan prosedur administrasi dalam proses penegakan

hukum masih menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan.

2.3 Analisis *Das Sollen* dan *Das Sein* Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Secara normatif (*das sollen*), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menghendaki agar penanggulangan penyalahgunaan etomidate dilaksanakan melalui pendekatan preventif, preemtif, represif, rehabilitatif, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian (*das sein*) menunjukkan bahwa BNN Kota Surabaya telah mengimplementasikan berbagai strategi tersebut melalui pengawasan toko vape, operasi bersama, sosialisasi, pemetaan daerah rawan, serta pengawasan distribusi digital. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, faktor hukum telah memberikan kepastian melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025, sedangkan faktor penegak hukum menunjukkan adanya koordinasi yang cukup baik antar instansi. Akan tetapi, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan masih menjadi kendala utama yang menyebabkan implementasi pengawasan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan fasilitas deteksi yang memadai, serta penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyalahgunaan etomidate dalam *liquid vape*.

C. KESIMPULAN

Perubahan status yuridis Etomidate menjadi Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 telah memperkuat dasar hukum bagi BNN Kota Surabaya dalam melaksanakan pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Etomidate yang disamarkan dalam *liquid vape*. Perubahan tersebut mendorong transformasi sistem pengawasan dari pendekatan yang semula berorientasi pada pengawasan kefarmasian menjadi pengawasan berbasis rezim hukum narkotika melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pengawasan terhadap toko vape, serta peningkatan deteksi dini terhadap potensi peredaran Etomidate. Namun demikian, secara empiris implementasi kewenangan tersebut belum sepenuhnya optimal karena hingga penelitian dilakukan belum ditemukan perkara Etomidate yang diproses di Kota Surabaya, sehingga pengawasan masih berfokus pada langkah preventif dan antisipatif terhadap potensi penyalahgunaan (Damayanti, Surabaya, and Rusdiana 2025).

Strategi yang diterapkan BNN Kota Surabaya meliputi pengawasan lapangan, pemetaan wilayah rawan, edukasi kepada masyarakat, pemanfaatan media sosial, serta penguatan kerja sama dengan Polri, BPOM, Pemerintah Kota Surabaya, dan instansi terkait. Meskipun demikian, efektivitas strategi tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana deteksi laboratorium, berkembangnya pola distribusi melalui media digital, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perubahan status hukum Etomidate. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kesiapan aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas laboratorium, penyediaan teknologi deteksi yang memadai, optimalisasi koordinasi antarinstansi, dan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat

merupakan langkah yang diperlukan untuk mewujudkan pengawasan Etomidate yang lebih efektif dan memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.

D. REFERENSI

Anon. 2025. "Permenkes No. 15 Tahun 2025." 1–19.

Bnnri. N.D. "Etomidate." Retrieved (<https://Ews.Bnn.Go.Id/6784/>).

Damayanti, Adinda Aprilia, Surabaya, And Emmilia Rusdiana. 2025. "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Lembaga Adhyaksa Al Hidayat Kabupaten Sampang." 2.

Ii, B. A. B., And A. Penegakan Hukum. 2010. "Teori Soerjono Soekanto."

Rahmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, Kepala Badan, Narkotika Nasional, And Republik Indonesia. 2024. "Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024."

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani Prasetya, And Ali Rizky. 2022. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan Development Of Theories Of The Purpose Of Punishment." 6(2):176–88.

Siregar, Rospita Adelina. 2026. "Vape Berbasis Etomidate-Ketamin Dan Isu Ketidakpastian Hukum Dalam Klasifikasi Narkoba Berdasarkan Regulasi Terbaru Etomidate-Ketamine-Based Vapes And The Issue Of Legal Uncertainty In Drug Classification Under The Latest Regulations." 9(1):963–67. Doi: 10.56338/Jks.V9i1.10090.

Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Wali Pers.

Tv, Metro. N.D. "Polisi Bongkar Produksi Etomidate Di Jakarta Utara - [Primetime News]."

Vapemagzofficial. N.D. "10 Provinsi Indonesia Dengan Pengguna Vape Terbanyak 2023." Retrieved (https://Www.Instagram.Com/P/C96qsyetghv/?Img_Index=2).

